

Perekonomian Indonesia Pasca Pemutusan Kontrak dengan IMF

Edy Suandi Hamid

IMF Contract exit constitutes the best choice particularly in escaping the dependence of Indonesia from foreign intervention regarding economy policies. The fund and natural resources of Indonesia could be expected to pay Indonesia loan from IMF nowadays. In this sense, emotional attitude and narrow nationalism are not enough to avoid the negative influence of IMF exit strategy. So, an anticipative step and radical policy should be conducted by Indonesian government to stop corruption, collusion, and nepotism practices strictly and consequently. Besides, ending IMF contract in Indonesia could be used for both modern sector and traditional sector. Traditional sector, it is clear that marginalized. The traditional sector indicates survival sector and can create a vocation.

Keputusan Jalan Tengah

SETELAH melalui polemik yang panjang dan perdebatan alot dalam kabinet, akhirnya pemerintah memutuskan kontrak kerja sama dengan IMF. Ini sudah sesuai dengan amanat rakyat yang ditetapkan oleh MPR dalam Tap Nomor VI/2002. Sedangkan opsi yang dipilih setelah lepas dari kerja sama dengan IMF tersebut adalah lewat *post program monitoring*. Dengan opsi ini Indonesia tidak lagi memperoleh pinjaman dan dukungan fasilitas lainnya dari IMF sebagaimana terjadi sejak akhir 1997. Namun demikian, Indonesia belum melunasi utangnya dari lembaga keuangan internasional tersebut. Sebagai konsekuensinya, Indonesia tetap dipantau secara intensif sampai utang tersebut lunas. Keputusan ini masih menyisakan rasa puas dan tidak puas dari yang pro-PPM maupun dari yang kontra-PPM. Ekonom yang berpikiran "*radikal*", seperti Kepala Bappenas *Kwiek Kian Gie* dan Kelompok

Indonesia Bangkit yang dimotori mantan Menko Ekuin *Dr. Rizal Ramli*, tidak puas dengan keputusan tersebut karena dianggap masih menggantungkan diri dan membuka peluang campur tangan dari IMF.

Keputusan ini di satu sisi dapat dinilai positif, karena ada keberanian dari Pemerintah untuk melepaskan diri dari IMF. Karena walaupun sebelumnya sudah ada Tap MPR namun sebagian pejabat di Ekuin masih mencoba untuk tetap melanjutkan hubungan dengan IMF sebagaimana satu dari empat opsi yang ditawarkan. Keberanian ini patut digarisbawahi karena dengan keputusan ini bidang Ekuin kita dipaksa untuk lebih mandiri dalam menyusun dan menetapkan programnya. Program kerja ekonomi kita tidak harus dikonsultasikan lagi dengan IMF. Dipaksa juga untuk mencari jalan sendiri dalam menutup defisit anggaran. Terpaksa pula menegosiasikan sendiri penjadwalan utangnya, karena Forum Paris Club yang selama ini difasilitasi IMF akan berakhir.

Namun demikian di sisi lain keputusan ini juga masih "tanggung". Pemerintah masih setengah-setengah, karena menyisakan "otoritas" pada IMF untuk terus memantau kebijakan ekonomi kita. Indonesia masih belum berani menetapkan "talak 3" dengan IMF. Konsekuensinya, pemerintah wajib memberikan laporan, dan IMF akan memberikan penilaian (yang tentunya juga "nasihat") yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi tersebut. IMF tentu masih bisa memberikan tekanan terhadap pemerintah. Karena dengan penilaian tersebut dapat mempengaruhi sikap pasar terhadap Indonesia. Ini memungkinkan IMF untuk terus mempengaruhi kebijakan ekonomi nasional. Namun demikian, dari sisi kontrol, pemantauan IMF ini juga mempunyai nilai positif, karena mentalitas pejabat kita yang lebih tunduk diawasi asing ketimbang bangsanya sendiri, terlebih lembaga pengawas tidak berfungsi secara optimal. Adanya pemantauan dari IMF paling tidak memberikan rambu-rambu bagi para petinggi ekonomi untuk membuat kebijakan-kebijakan yang diwarnai *vested interest*, baik itu bagi kepentingan pribadi, kelompok, ataupun golongan.

Keputusan untuk memilih opsi PPM dapat dikatakan sebagai keputusan moderat atau jalan tengah. Karena dari polemik yang muncul sebelumnya, terdapat pandangan yang menginginkan untuk terus melanjutkan program kerja sama dengan IMF. Artinya, kita terus menerima kucuran bantuan, dan konsekuensinya Indonesia harus tunduk atau mengacu pada *letter of intent* dengan IMF dalam setiap kebijakan ekonominya. Di sisi lain juga muncul pandangan radikal untuk lepas sepenuhnya dari IMF. Membayar lunas semua utang pada IMF, dan tidak perlu lagi ada pemantauan apapun dari lembaga internasional ini.

Qua vadis?

Dengan keputusan tersebut dan melihat suasana ekonomi-politik di tanah air maka wajar kalau muncul pertanyaan: *quo vadis Indonesia pasca kerja sama dengan IMF ini?* Jawaban atas pertanyaan tersebut sangat tergantung pada elit kekuasaan Indonesia, di samping juga suara-suara pandangan pengamat yang mewarnai media massa. Jika keputusan ini masih terus diwarnai dengan perdebatan-pedebatan puas-tidak puas atas keputusan tersebut dan tanpa agenda aksi yang jelas untuk memperkuat ekonomi setelah IMF mundur, maka pemulihan ekonomi akan sulit diharapkan. Perdebatan yang tidak berkesudahan, terlebih di kalangan pengambil kebijakan sendiri, akan membuat pasar ragu-ragu dan sulit membaca arah kebijakan ekonomi nasional. Ketidakpastian menjadi semakin tinggi, sehingga akan membawa ekonomi semakin terpuruk.

Oleh karena itu saat ini bukan lagi masanya untuk berdebat, melainkan mencari cara untuk mengantisipasi berbagai dampak negatif yang mungkin timbul, dan menyusun agenda aksi guna mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai perbedaan pendapat tidak harus selalu dibawa ke ruang publik apabila hal demikian justru menimbulkan kepanikan pasar. Namun ini tidak berarti menghentikan kajian ilmiah untuk menguji berbagai langkah yang diambil berkaitan dengan keputusan tersebut. Bagaimanapun peninjauan terhadap keputusan tersebut, jika ternyata berdampak merugikan, masih bisa dilakukan pada tahun-tahun mendatang. Percepatan pembayaran utang dan kemudian lepas sekali dari IMF dapat dilakukan, sebagaimana juga dilakukan Thailand yang hanya 27 bulan berada dalam PPM (selesai Agustus 2002). Hanya saja

saat ini dan saat awal dari pelaksanaan keputusan tersebut tahun depan sangat diperlukan suatu iklim yang tenang, *cooling down*, karena tanpa kebijakan inipun berbagai riak-riak politik menjelang Pemilu sudah mengancam stabilitas ekonomi.

Tetap Anggota IMF

Kontrak dengan IMF tersebut akan berakhir tahun 2003 ini, dan kesepakatan dengan pola PPM akan mulai dilaksanakan Januari 2004. Pemutusan kontrak tersebut tidak berarti Indonesia keluar dari keanggotaan IMF. Keanggotaan tetap seperti biasa. Indonesia mempunyai kewajiban membayar iuran keanggotaannya. Sebagai konsekuensinya, Indonesia berhak memperoleh pinjaman sampai *kuota* yang diberikan untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan kesulitan dalam neraca pembayaran internasional. Sesuai kuota yang dimiliki, tanpa Lol pun Indonesia bisa meminjam sampai sekitar US\$ 2,8 miliar dari IMF. Jadi, hak untuk meminta bantuan yang sifatnya *normal* tersebut tetap bisa dilakukan, walaupun kontrak dengan IMF yang sudah berjalan sejak 1997 dihentikan.

Pemutusan kontrak berarti perjanjian-perjanjian yang sifatnya khusus, yang diikat dengan yang selama ini dikenal sebagai *letter of intent* atau formalnya disebut *Memorandum of Economic and Financial Policies* (MEFP) dihentikan. Dengan putusannya kontrak tersebut berarti: (1) Indonesia harus mencicil utang yang dibuat selama ini sampai batas kuota pinjaman normalnya; (2) tidak ada lagi pinjaman baru dari IMF, yang selama ini digunakan untuk memperkuat cadangan devisa nasional; (2) Forum pertemuan Paris Club yang difasilitasi oleh IMF untuk menjadwalkan akan berhenti. Artinya, jika tidak ada forum

lain untuk membicarakan hal tersebut, maka Indonesia harus membayar bunga dan cicilan utang luar negerinya sesuai dengan jadwal yang sudah ada.

Itu akibat langsung yang pasti terjadi setelah kontrak terhenti. Namun dampak dari pemutusan kontrak tersebut bukan hanya itu, namun bisa lebih luas lagi. Dampak ini bisa berarti buruk, normal, atau membuat perekonomian Indonesia jauh lebih baik. Kemungkinan dampak tersebut tergantung dengan langkah-langkah yang diambil oleh Indonesia setelah pemutusan kontrak tersebut. Pandangan yang pesimis menyatakan bahwa pemutusan kontrak hubungan membahayakan perekonomian Indonesia yang sudah mulai bangkit. Alasannya, situasi ekonomi-politik Indonesia masih belum stabil. Kepercayaan pasar juga disangsikan jika IMF mundur dari keterlibatannya dalam membantu Indonesia. Sebaliknya, pandangan yang pesimis menyatakan Indonesia bisa lebih baik tanpa IMF. Ini terkait dengan bantuan IMF selama ini yang ternyata lebih banyak menimbulkan beban, dan pengorbanan/pembiayaan yang dikeluarkan Indonesia selama ini tidak sepadan dibandingkan dengan hasil yang minimal dalam pemulihan ekonomi.

Pilihan pemerintah yang menempuh pemantauan pasca pemutusan kontrak (PPM), yang sebelumnya juga menjadi pilihan Korea Selatan dan Thailand yang kini berhasil keluar dari krisis. Memang jika kita melihat pengalaman empirik dari Korea Selatan dan Thailand sudah memutuskan kontrak dengan IMF tahun 2000; pilihan yang "terbukti" ampuh adalah memutus kontrak namun dengan tetap dipantau kebijakan ekonomi kita oleh IMF. Namun demikian harus dipahami bahwa Indonesia berbeda dengan Thailand ataupun Korea Selatan. Pada awal krisis, misalnya, langkah yang

kita ambil sama dengan kedua negara tersebut, yaitu langsung meminta bantuan IMF. Namun hasilnya sangat berbeda. Kedua negara tersebut berhasil mengatasi krisis jauh lebih awal dibandingkan Indonesia. Ini berarti walaupun kita memilih kebijakan yang sama, hasilnya bisa berbeda. Demikian pula pengalaman empirik Malaysia yang tidak meminta bantuan IMF ternyata jauh lebih cepat keluar dari krisis dari negara-negara yang meminta bantuan ke IMF. Bahkan yang terakhir ini semakin gencar melakukan akselerasi untuk mengejar pembangunan tetangganya, Singapura.

Ini menunjukkan resep atau terapi yang sama bisa menghasilkan hasil atau "kesehatan" yang berbeda. Keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan ekonomi tidak melulu ditentukan oleh variabel ekonomi saja. Di samping terkait dengan situasi sosial, politik, keamanan, dan sebagainya, juga dipengaruhi oleh kondisi birokrasinya. Oleh karena itu, program pemantauan oleh IMF pasca pemutusan kontrak tidak otomatis membuat ekonomi kita akan bisa seperti Thailand dan Korea Selatan. Selama ini, dengan pengawasan dan kontrak yang ketat dari IMF pun ternyata justru menghasilkan perkembangan ekonomi yang minimal. Memang dalam pengalaman "mengobati" ekonomi anggotanya, IMF tidak selalu berhasil, khususnya dalam membantu negara-negara sedang berkembang. Oleh karena itu, tidak mengherankan banyak yang menentang peran IMF dalam membantu negara-negara berkembang. Sebelum diuraikan lebih lanjut berkaitan antisipasi yang perlu dilakukan, diuraikan lebih dulu tentang sejarah dan visi IMF dan pandangan penentangannya.

Visi IMF dan Penentangannya

Dana Moneter Internasional (IMF) didirikan pada tahun 1944 di Bretton Woods

(New Hampshire). Badan ini dibentuk untuk membantu negara yang mengalami kesulitan yang terkait dengan neraca pembayaran dan nilai tukarnya. IMF didesain sebagai suatu bank sentral internasional. Secara lebih luas, pada pasal 1 (*Articles of Agreement*) tanggung jawab IMF ini adalah mempromosikan kerjasama moneter internasional; memfasilitasi perluasan perdagangan internasional; mendukung stabilitas nilai tukar; membantu pendirian sistem pembayaran multilateral; dan penghapusan restriksi pertukaran valuta; dan memberikan kepercayaan/keyakinan (*confidence*) kepada anggota dengan penyediaan cadangan sementara untuk meminimalkan gangguan dari adanya penyesuaian yang berkaitan dengan masalah neraca pembayaran (BOP); serta membantu mengatasi problematika yang ditimbulkan oleh adanya ketidakseimbangan dalam BOP (Masson and Mussa, 1995).

Dari anggotanya yang saat ini berjumlah 184 negara, IMF menerima iuran/kontribusi dalam bentuk emas, dollar atau kekayaan lainnya, yang disesuaikan dengan jumlah penduduk, tingkat kemajuan ekonomi, serta posisi negara tersebut dalam perdagangan dunia. Kontribusi anggota ini menentukan hak suara anggota dalam pengambilan keputusan di IMF. IMF juga mencetak "uang", yang dikenal dengan sebutan *special drawing rights* (SDR), yang dapat digunakan untuk transaksi antar pemerintah ataupun bank sentral antar negara (Kindleberger and Lindert, 1982). Dengan dominasi AS dalam memberikan kontribusi dana, maka segala keputusan IMF pun harus mendapat "restu" AS. Persetujuan AS dibutuhkan mengingat keputusan penting IMF harus didukung minimal 85% suara, padahal AS sendiri memiliki 18% hak suara di IMF tersebut (Stiglitz, 2002). Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ide-ide IMF

sejalan dan selalu digiring ke arah gagasan liberalisme negara adikuasa tersebut.

Jika Indonesia meminta bantuan kepada IMF untuk mengatasi krisis nilai tukar yang kemudian meluas menjadi krisis ekonomi, maka itu merupakan hak Indonesia. Namun permintaan bantuan kepada IMF bukanlah sesuatu yang cuma-cuma, atau tanpa syarat. Persyaratan yang ketat harus dipenuhi atas bantuan yang diberikan kepada anggota. Hal inilah yang menyebabkan munculnya pandangan pro-kontra di tanah air ketika pemerintah mengajukan permohonan bantuan ke IMF tersebut. Ini dianggap akan membuka jalan intervensi lembaga internasional tersebut atas kebijakan ekonomi domestik. Kenyataannya, selama hampir lima tahun dalam perawatan IMF, kekhawatiran itu terjadi, dan celakanya lagi perbaikan ekonomi yang mewujud sangat jauh dari yang diharapkan.

Sebagian pakar politik menganggap intervensi IMF sebagai wujud dari kolonialisme baru. Argumentasinya, di balik keputusan IMF ada negara-negara maju yang mengendalikannya, dan ini dapat dilakukan karena kontribusi dananya sangat besar pada lembaga keuangan tersebut. Dengan demikian, visi negara-negara industri itu pula yang mewarnai kebijakan IMF. Pandangan yang demikian, yang kurang mendukung peran IMF dalam membantu negara berkembang, juga muncul dari kelompok ekonom strukturalis. Namun alasannya berbeda, yakni dikaitkan dengan keefektifan langkah-langkah atau paket kebijaksanaan yang dipaksakan kepada negara berkembang untuk dilaksanakan dalam mengatasi kesulitan ekonominya. Visi dan kerangka kebijakan IMF adalah berbasis dan diorientasikan pada kondisi negara maju, dengan asumsi-asumsi yang umum terjadi di negara tersebut, sehingga

terkadang berbeda dengan yang dibutuhkan oleh negara berkembang seperti Indonesia. Pandangan IMF secara frontal ditolak para pemikir *Strukturalis*, yang menganggap problematik negara berkembang secara kualitatif berbeda dengan negara maju. Karenanya, *treatment* mengatasi masalah ekonomi negara berkembang harus berbeda pula dengan di negara maju (lihat John Weiss, 1995, juga Raghendra Jha, 1995).

Kemungkinan Dampak Pemutusan Kontrak dengan IMF

Pemutusan hubungan dengan IMF ini dapat dijadikan sebagai momentum untuk membuat pemerintah dan rakyat Indonesia lebih mandiri. Ini bukan berarti kita lepas sama sekali dari hubungan ekonomi dengan negara atau lembaga ekonomi/keuangan internasional. Tidak ada satu negara di dunia pun yang bisa hidup layak tanpa berhubungan dengan negara lain. Pengisolasian dari hubungan ekonomi internasional justru akan membuat ekonomi semakin terpuruk. Yang ingin ditekankan dari makna kemandirian di atas adalah "tidak tergantung", yang substansinya adalah berdaulat, tidak didikte, dan ada hubungan kesetaraan dengan pihak lain di luar negeri. Namun demikian, dengan keputusan untuk lepas dari IMF maka perlu dicermati implikasi dan risiko yang akan dan bisa timbul dari kebijakan tersebut.

Pertama, dari sisi pasar, sentimen negatif bisa saja muncul. Terlebih jika keputusan ini terkesan belum "bulat" dan masih diterima setengah hati oleh pengambil keputusan di bidang ekonomi. Keraguan birokrasi kita, akan berimbas pada keraguan pelaku ekonomi, terutama kalangan investor, yang dapat menyebabkan meningkatnya *country risk* Indonesia.

Kedua, pembayaran utang luar negeri akan meningkat. Beban anggaran (APBN)

akan semakin berat. Ini jika negosiasi pemerintah dengan kreditor tidak bisa berlanjut dengan dihentikannya forum Paris Club yang difasilitasi dan didukung IMF.

Ketiga, adanya tekanan pada mata uang rupiah sebagai akibat menurunnya cadangan devisa dan meningkatnya kewajiban pembayaran utang luar negeri.

Keempat, aksi spekulasi kemungkinan akan muncul lagi. Dalam kondisi transisi, para spekulasi biasanya akan masuk dan memanfaatkan ketidakstabilan pasar, terutama pasar valuta asing dan pasar uang.

Kelima, *timing* pemutusan kontrak dengan IMF terjadi pada saat situasi suhu politik domestik yang diperkirakan akan naik karena menjelang Pemilu. Hal ini mengganggu kebijakan ekonomi yang bagaimana pun akan dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan politik.

Implikasi yang demikian belum tentu akan terjadi. Bahkan selama ini sebagian sengaja dibesar-besarkan agar Indonesia terus dalam perawatan IMF. Namun kemungkinan tersebut perlu dikemukakan agar kita lebih siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan tersebut, dan persoalan yang muncul bisa disikapi secara dini. Misalnya, forum Paris Club bisa dinegosiasi dan dilanjutkan oleh pemerintah sendiri tanpa harus melalui IMF. Bagaimana pun kreditor atau negara donor ikut bertanggung jawab dan memahami kondisi riil yang dihadapi saat ini. Jadi masalah penjadwalan tetap ada peluang.

Dengan kondisi *cadangan devisa netto* yang cukup besar, sekitar US\$ 24 miliar, maka penghentian kontrak ini tidak terlalu merisaukan. Jika dalam cadangan devisa ini dimasukkan juga devisa berupa SDR dari IMF sejumlah US\$ 8,2 miliar, maka total cadangan devisa per Februari 2003 mencapai US\$ 32,2 miliar (BI, 2003). Bahkan angka

itu saat ini sudah meningkat lebih dari US\$ 34 miliar. Dengan cadangan devisa netto itu saja akan mampu membiayai impor lebih dari enam bulan. Pada masa sebelum krisis, cadangan devisa rata-rata bisa menutup impor 3 bulan. Ini berarti, dalam kondisi normal, cadangan devisa saat ini cukup kuat. Hanya saja kejutan-kejutan (*shock*) bisa saja terjadi sebagai akibat pemutusan kontrak tersebut, seperti munculnya keraguan investor asing atau negara kreditor terhadap kebijakan dan stabilitas ekonomi Indonesia.

Langkah pemutusan kontrak ini memang agak terlambat. "Jeratan" IMF pada kendali kebijakan perekonomian Indonesia sudah sangat lama dengan hasil yang minimal, namun menelan biaya sosial-ekonomi yang mahal. Tetangga kita yang sama-sama mengalami krisis, Korea Selatan dan Thailand, hanya kurang dari dua tahun sudah melepaskan diri dari IMF. Bahkan, Malaysia pada awal krisis secara tegas menolak untuk dibantu IMF. Indonesia yang dalam sistem ekonominya yang ber-Pancasila mensyaratkan *nasionalisme ekonomi*, justru terjebak dalam tangan IMF, dan ternyata juga gagal memulihkan ekonomi nasional.

Sebetulnya IMF bisa saja tetap membantu Indonesia, dan ini memang kewajiban IMF karena Indonesia merupakan anggota yang punya hak untuk menuntut bantuan tersebut, khususnya manakala mengalami kesulitan neraca pembayaran internasional. Namun bantuan itu tidak harus dalam "paket besar" yang menyeluruh, dengan persyaratan sangat ketat sehingga tidak ada fleksibilitas rakyat Indonesia untuk menentukan sendiri kebijakan ekonominya. Misalnya, IMF memberikan bantuan *case by case* sehingga tidak harus mengikat bangsa In-

Indonesia dengan menuruti segala kemauan IMF.

Agenda Aksi

Dengan mundurnya IMF dari "pengelolaan" ekonomi Indonesia ini, maka perlu disikapi dan diwaspadai kemungkinan dampak negatif yang muncul. Birokrasi ekonomi kita selama lima tahun di-*back up* secara ketat oleh IMF dan kemudian dilepas, sehingga yang terjadi bagaikan "anak yang ditinggal pergi" orang tuanya. Akibatnya mengalami *shock* karena kehilangan penuntun dan belum siap mandiri. Sikap menteri-menteri bidang ekuiin yang setengah hati memutuskan kontrak dengan IMF merupakan pencerminan sikap belum mandiri tersebut. Ini pula yang bisa terjadi dengan penyusun dan pelaksana kebijakan ekonomi nasional.

Kondisi ini merupakan bagian pendewasaan yang harus dihadapi perencana dan pelaksana kebijakan ekonomi Indonesia. Karenanya aspek-aspek makro ekonomi seperti berkaitan dengan pemanfaatan utang luar negeri, masuknya modal asing, peningkatan ekspor, pengendalian impor, penghematan anggaran khususnya yang menggunakan devisa, dan mencegahnya terjadinya *capital outflow*. Kebijakan yang berkaitan dengan mengundang masuk dana dari luar negeri dan menghemat keluarnya devisa merupakan langkah yang diharapkan bisa mengkompensasi dana yang tak lagi mengucur dari IMF.

Pemutusan kontrak dengan IMF ini dapat dijadikan momentum untuk lebih mandiri, dan juga – sebagaimana dikatakan *Prof. Bambang Sudibyo* – untuk memulai kebijakan yang melihat ke dalam (*inward looking*). Kebijakan yang berorientasi ke luar (*outward looking*) memang penting, namun

perhatian ke dalam jangan diabaikan. Potensi dalam negeri sendiri, baik kekayaan sumber daya alam maupun pasarnya sangat besar. Namun karena terlalu berorientasi ke luar, ketergantungan kita pada luar menjadi sangat tinggi. Jika dilihat derajat keterbukaan ekonomi kita saat ini, angka sudah di atas 50%. Ini jauh di atas AS yang cuma 16%, atau Jerman yang hanya 30%. Ini menggambarkan bahwa ekonomi AS yang besar itu lebih bersifat *inward looking* dibandingkan Indonesia.

Ancaman awal dari penghentian kontrak dengan IMF adalah gejolak nilai tukar. Selama ini peran IMF sangat besar, oleh karena itu cadangan devisa perlu ditingkatkan, sehingga bisa secara cepat digunakan untuk mengatasi gejolak yang bisa saja terjadi. Dalam masa awal penghentian kontrak tersebut, diharapkan Bank Indonesia tak berpegang pada konvensi umum yang hanya mencadangkan devisa minimal 3-4 bulan impor, namun harus lebih besar lagi sebagai langkah berjaga-jaga. Dengan cadangan devisa yang kini sekitar US\$ 24 miliar, dalam jangka pendek persoalan ini dapat diatasi.

Pemerintah perlu pula mengoptimalkan berbagai sumber dana yang selama ini masih berada di luar budget negara (*off budget*) untuk mem-*back up* kebutuhan anggaran dan berjaga-jaga. Dana-dana tersebut antara lain dari Rekening Dana Investasi (RDI), Rekening 69 (dana dari selisih harga riil minyak bumi dibandingkan dengan harga dalam APBN), dana dari akumulasi SAL (Sisa Anggaran Lebih), yang nilai totalnya lebih dari Rp 65 triliun. "Indonesia Bangkit" tambahan penerimaan dari berbagai sumber selama tiga tahun ke depan bisa mencapai Rp 524 triliun. Angka ini jauh lebih besar dari bantuan IMF selama ini.

Dalam kaitan dengan pemasukan devisa ini, dari jauh hari pula pemerintah harus mengevaluasi tidak bisa ditariknya sebagian komitmen dana dari CGI yang besarnya 25% dari komitmen yang ada. Ini berarti masih ada sumber devisa di luar IMF yang bisa dimanfaatkan jika program-program kerja bisa dilaksanakan sesuai jadwal dan pemerintah serius mengelola program dan proyek yang didanai dengan utang luar negeri. Manajemen utang luar negeri perlu diaudit total sehingga peluang realisasi dari komitmen pinjaman dari CGI bisa dimanfaatkan secara penuh. Dengan demikian, komitmen yang tinggi yang menimbulkan konsekuensi pembayaran *commitment fee* yang tinggi pula, tidak perlu terjadi.

Devisa yang signifikan bisa diharapkan adalah dari penanaman modal asing dan ekspor. Belakang ini PMA justru menurun, dan ekspor nomigas pun tersendat-sendat. Karenanya ini perlu dievaluasi dan diambil langkah untuk memberikan insentif pada pemodal asing, khususnya untuk penanaman modal langsung, dan upaya mendorong ekspor. Pemerintah dituntut untuk mengeluarkan kebijakan yang berani yang diharapkan bisa mengundang masuk devisa ke dalam negeri, baik dari investasi asing maupun ekspor tersebut.

Dalam konteks pemanfaatan dana dari sumber daya alam, pemerintah perlu meninjau kembali secara menyeluruh potensi penerimaan dari berbagai kontrak dan eksploitasi yang ada, baik itu dari sektor pertambangan, kehutanan, maupun dari sumber daya kelautan. Berbagai sinyal yang ada menunjukkan bahwa penerimaan pemerintah dari sektor SDA ini jauh dari potensinya. Akibat kontrak Freeport yang tak jelas dalam eksploitasi tambang tembaga, emas dan perak di Irian Jaya yang sudah

beroperasi sejak 1978, potensi kerugian negara mencapai puluhan bahkan ratusan triliun rupiah. Ini dari satu perusahaan, padahal sangat banyak perusahaan asing dan domestik beroperasi dalam sektor SDA di tanah air. Data lain yang mengindikasikan besarnya potensi kekayaan negara yang hilang bisa dilihat dari laporan yang menunjukkan besarnya penyelundupan atas SDA Indonesia setiap tahunnya. Penyelundupan pasir laut nilainya mencapai US\$ 8 miliar, BBM US\$ 5,6 miliar, kayu US\$ 3-4 miliar, dan kekayaan laut US\$ 4 miliar (*Kompas* 16/2/03). Jelas dari angka-angka ini saja menunjukkan potensi domestik sangat besar untuk tidak tergantung pada luar. Masalahnya adalah mentalitas KKN di semua lini pemerintahan dan lemahnya penegakan hukum telah mengakibatkan ratusan triliun rupiah kekayaan negeri ini menguap. Padahal jika berbagai potensi kekayaan itu bisa dimanfaatkan secara benar, maka tidak perlu lagi Indonesia tergantung pada pinjaman luar negeri ataupun bantuan dari IMF.

Tekad untuk lepas dari ketergantungan pada lembaga keuangan internasional ini perlu juga diikuti oleh disiplin dalam penggunaan anggaran pemerintah. Masalah disiplin anggaran ini sebenarnya juga menjadi salah satu cara yang tersurat dalam APBN 2003 ini dan juga APBN sebelumnya. Dalam UU APBN (2003) salah satu cara mengurangi defisit anggaran juga melalui peningkatan disiplin anggaran dan penghematan anggaran belanja negara. Jadi bukan hanya mengurangi subsidi. Ini yang tidak muncul secara kuantitatif dari kebijakan sekarang ini. Bagaimana dan apa upaya kongkret dari penghematan dan penerapan disiplin anggaran tersebut. Berapa dana yang dihemat dari penerapan ini. Seharusnya beban anggaran ini juga "dipikul" oleh pejabat-pejabat yang korup,

boros, dan tidak efisien dalam mengelola uang rakyat. Namun sejauh ini masih tidak secara jelas dan terukur bagaimana kebijakan ini dilaksanakan. Akibatnya berbagai pemborosan anggaran pun masih terjadi.

Penutup

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa langkah untuk mengakhiri kontrak dengan IMF merupakan pilihan terbaik untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada pihak luar yang selama ini sangat mendikte kebijakan ekonomi nasional namun dengan hasil yang jauh dari yang diharapkan. Berbagai potensi dana dan sumber daya alam yang dimiliki dan yang belum dimanfaatkan secara efisien diharapkan mampu mengkompensasi berbagai bantuan IMF selama ini. Namun demikian, sikap emosional dan rasa nasionalisme saja tidak cukup untuk menghindari dampak negatif dari pemutusan kontrak tersebut. Oleh karena itu langkah antisipatif dan kebijakan radikal yang harus juga ditanggung pejabat negara, melalui pendisiplinan anggaran dan penghapusan praktik-praktik KKN, perlu dilaksanakan secara tegas dan konsekuen.

Pemutusan hubungan dengan IMF yang sebagian besar kebijakannya bisa untuk sektor modern, sekaligus juga untuk memberikan dukungan lebih besar pada sektor tradisional yang berupa ekonomi rakyat banyak yang selama ini terpinggirkan. Padahal bukti sangat jelas menunjukkan bahwa dalam situasi krisis ekonomi justru sektor ini yang bertahan dan menjadi katup

penyelamat ekonomi Indonesia, baik dari sisi penciptaan kesempatan kerja maupun mendukung laju perekonomian. Kemandirian ekonomi Indonesia selama ini justru ditunjukkan oleh ekonomi rakyat yang tidak tergantung dari pihak luar, baik itu berupa fasilitas maupun kredit dari perbankan, terlebih lagi dari sektor internasional. ●

DAFTAR PUSTAKA

- Guitian, Manuel, (1992), *"The Unique Nature of the Responsibilities of the IMF"*, Washington DC, IMF.
- Hamid, Edy Suandi, (2000), *Perekonomian Indonesia: Masalah dan Kebijakan Kontemporer*, UII Pres, Yogyakarta
- Jha, Raghbendra, (1994), *"Macroeconomics for Developing Countries"*, London, Routledge.
- Masson, Paul R dan Mussa, Michale, (1995), *"The Role of the IMF"*, Washington DC, IMF.
- Ramli, Rizal (2003), "Malpraktek dan Mitos IMF di Indonesia", *makalah disampaikan dalam Kongres ISEI ke-15 di Malang, 13-15 Juli 2003*
- Weiss, John, (1995), *Economic Policy in Developing Countries: The Reform Agenda*,
- , (2002) *Pasca IMF Indonesia Bangkit*, nn

